



# LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KSDAE 2023

**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KSDAE**  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



**LAPORAN KINERJA**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KSDAE**  
**2023**

**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KSDAE**  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan





Rusa Timor//TWA Pananjung Pangandaran  
Dokumentasi: BBKSDA Jawa Barat

## KATA PENGANTAR



Dalam setiap perjalanan yang kita lalui, terdapat titik balik yang menjadi penanda sejarah. Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen KSDAE disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas selama tahun 2023 dalam mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE sesuai indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Indikator dan target kinerja yang diperjanjikan dalam periode tahun 2023 yaitu nilai SAKIP Ditjen KSDAE

sebesar 79,5 poin, level maturitas (SPIP) Ditjen KSDAE pada level 3, dan laporan keuangan Ditjen KSDAE 1 dokumen.

Laporan ini mencerminkan dedikasi kami dalam menjalankan mandat untuk melaksanakan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Tahun 2023 ini, kami dapat mencapai ketiga target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Kami berharap Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen KSDAE Tahun 2023 ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang upaya kami dalam menjalankan misi terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Kami juga berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan inspirasi bagi semua pihak.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pegawai lingkup Sekretariat Ditjen KSDAE dan semua pihak yang telah berperan dan mendukung pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal KSDAE. Saran dan masukan untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang sangat kami harapkan. Semoga Sekretariat Ditjen KSDAE dapat mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Jakarta, Januari 2024  
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Suharyono, SH, M.SI, M.Hum.  
NIP. 196704011994031003





Rakor Evaluasi Tahun 2023  
Dokumentasi: Setditjen KSDAE

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu mengacu kepada Keputusan Menteri LHK Nomor 975 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen KSDAE disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2020-2024.

Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2023 adalah program dukungan manajemen dengan sasaran program peningkatan tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif, dan berpelayanan prima. Untuk mencapai sasaran program tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE bertanggung jawab sebagai pelaksana kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal KSDAE dengan sasaran kegiatan yaitu terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Indikator dan target kinerja kegiatan yang diperjanjikan dalam periode tahun 2023 yaitu nilai SAKIP Ditjen KSDAE sebesar 79,50 poin, level maturitas (SPIP) Ditjen KSDAE pada level 3, dan laporan keuangan Ditjen KSDAE 1 dokumen.

Tabel 1. Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen KSDAE tahun 2023

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
1	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	79,5 Poin	79,88 Poin
2	Level Maturitas SPIP Ditjen KSDAE	Level 3	Level 3 (3,7 poin)
3	Laporan Keuangan Ditjen KSDAE	1 Dokumen	1 Dokumen

Dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2023, anggaran yang digunakan yaitu sebesar Rp. 73.428.143.882,- atau 98,70 % dari pagu Rp. 74.392.253.000,-.





## DAFTAR ISTILAH

BMN	: Barang Milik Negara
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
CaLK	: Catatan atas Laporan Keuangan
Dirjen	: Direktur Jenderal
DJA	: Direktorat Jenderal Anggaran
IKK	: Indikator Kinerja Kegiatan
IKP	: Indikator Kinerja Program
IKU	: Indikator Kinerja Utama
KKOTL	: Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Kasubbag	: Kepala Sub Bagian
KKHSG	: Konservasi Keanekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KSDA	: Konservasi Sumber Daya Alam
KSDAE	: Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
KSP	: Kantor Staf Presiden
LKj	: Laporan Kinerja
LPE	: Laporan Perubahan Ekuitas
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
PEHKT	: Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik
LO	: Laporan Operasional
PJLKK	: Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi
PK	: Perjanjian Kinerja
PN	: Prioritas Nasional
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
POK	: Petunjuk Operasional Kegiatan
PPNP	: Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
PPPK	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
RB	: Reformasi Birokrasi
Renja	: Rencana Kerja
Renstra	: Rencana Strategis
SAIBA	: Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Setditjen	: Sekretariat Direktorat Jenderal
SPIP	: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
TN	: Taman Nasional
TU	: Tata Usaha
UAKPA	: Unit Akuntansi Pengguna Anggaran
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian





SM Karang Gading  
Dokumentasi: BBKSDA Riau



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	iv
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	vi
<b>DAFTAR ISTILAH</b>	viii
<b>DAFTAR ISI</b>	x
<b>DAFTAR TABEL</b>	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	xiv
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi	2
C. Sumber Daya Manusia	4
D. Aset	5
<b>BAB II   PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis Sekretariat Ditjen KSDAE	7
B. Rencana Kinerja Sekretariat Ditjen KSDAE	8
C. Pagu Anggaran Tahun 2023	9
<b>BAB III  AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja	12
1. Indikator Kinerja Kegiatan Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	13
2. Indikator Kinerja Kegiatan Level Maturitas SPIP Ditjen KSDAE	19
3. Indikator Kinerja Kegiatan laporan Keuangan Ditjen KSDAE	21
B. Realisasi Anggaran	23
C. Dukungan Terhadap Prioritas Nasional	26
D. Pemantauan Kegiatan Tematik	26
1. Pemantauan Kantor Staf Presiden	26



a) Kegiatan Kebijakan Kelautan Indonesia 2023	26
2. Aksi Tematik KemenLHK	24
E. Capaian Rencana Kerja Setditjen KSDAE 2023	28
<b>BAB IV PENUTUP</b>	34
<b>LAMPIRAN</b>	35
A. Perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen KSDAE	35
B. Rencana Aksi Perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen KSDAE	38
C. Pohon Kinerja Sekretariat Ditjen KSDAE	38

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen KSDAE tahun 2023	vi
Tabel 2	Sebaran Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE 2023	4
Tabel 3	Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE 2023	4
Tabel 4	Pegawai Sekretariat Jenderal KSDAE Berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
Tabel 5	Rencana Strategis Sekretariat Ditjen KSDAE	7
Tabel 6	Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2023	8
Tabel 7	Pagu Anggaran Setditjen KSDAE 2023	9
Tabel 8	Pagu Anggaran Setditjen KSDAE 2023 Setelah Revisi	10
Tabel 9	Capaian Kinerja Kegiatan Setditjen KSDAE Tahun 2020 – 2024	12
Tabel 10	Capaian IKK Nilai SAKIP Ditjen KSDAE Tahun 2023	13
Tabel 11	Perbandingan Nilai SAKIP 2022-2023	17
Tabel 12	Neraca Ditjen KSDAE	22
Tabel 13	Pagu dan realisasi anggaran Setditjen KSDAE 2023	23
Tabel 14	Pagu dan realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja	25
Tabel 15	Pagu dan realisasi anggaran berdasarkan output	25
Tabel 16	Layanan Perkantoran	28
Tabel 17	Layanan Umum	28
Tabel 18	Layanan Sarana Internal	32
Tabel 19	Layanan Prasarana Internal	32



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Capaian Kinerja Setditjen KSDAE 2023	12
Gambar 2	Hasil Penilaian SAKIP 2023	14
Gambar 3	Kelemahan Hasil Penilaian SAKIP 2023	14
Gambar 4	Perbandingan Nilai SAKIP 2020-2023	16
Gambar 5	Perbandingan Nilai Level Maturitas 2020-2023	20

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen KSDAE	35
Lampiran 2	Rencana Aksi Perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen KSDAE	38
Lampiran 3	Pohon Kinerja Sekretariat Ditjen KSDAE	38



A scenic landscape photograph of Ranukumbolo lake. In the foreground, a large, weathered piece of driftwood with a textured, layered surface is partially submerged in the dark blue water. The water shows gentle ripples. In the background, a steep, forested hillside rises from the lake's edge. The trees are a mix of green and brown, suggesting a transition in seasons. The sky is filled with soft, grey clouds, and the overall lighting is natural and somewhat diffused.

Ranukumbolo  
Dokumentasi: BBTN Bromo Tengger Semeru



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak. Salah satu langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mengamanatkan agar instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Melalui penerapan SAKIP, sistem manajemen yang berorientasi pada hasil ini diharapkan dapat mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, dan responsif.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan dan melaporkan kinerja selama tahun 2023, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE sebagai unit Eselon II telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2023 adalah program dukungan manajemen dengan sasaran program peningkatan tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif, dan berpelayanan prima. Untuk mencapai sasaran program tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE bertanggung jawab sebagai pelaksana kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal KSDAE dengan sasaran kegiatan yaitu terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Indikator dan target kinerja kegiatan yang diperjanjikan dalam periode tahun 2023 yaitu nilai SAKIP Ditjen KSDAE sebesar 79,50 poin, level maturitas (SPIP) Ditjen KSDAE pada level 3, dan laporan keuangan Ditjen KSDAE sebanyak 1 dokumen.

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE adalah sebesar Rp 74.392.253.000.-. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta pencapaian target kinerja kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE didukung oleh 101 PNS yang tersebar di 2 Bagian, yaitu Bagian Program,

Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik (PEHKT) dan Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (KKOTL).

## **B. Struktur Organisasi**

Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE diarahkan untuk memenuhi tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal serta fungsi koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana, program pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan sistem informasi dan hubungan masyarakat, pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi, penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan, administrasi perjanjian kerjasama, dan pemberian pertimbangan dan advokasi hukum serta pelaksanaan urusan keuangan, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE yang didasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk memenuhi tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE terdiri dari Bagian Program Evaluasi, Hukum, dan Kerjasama Teknik, Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana serta Kelompok Jabatan Fungsional.



## SEKRETARIAT DITJEN KSDAE LEADER



**SUHARYONO, SH, M.SI, M.HUM**  
**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL**



**RATNA HENDRATMOKO, SH, M.HUM**  
**KEPALA BAGIAN PROGRAM, EVALUASI,  
HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIK**



**KARYADI, S.HUT, M.I.L**  
**KEPALA BAGIAN KEUANGAN, KEPEGAWAIAN,  
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA**



**NOFI SUGIYANTO, S.HUT, M.EC.DEV, M.A**  
**KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA**

### C. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2023 didukung oleh total pegawai sebanyak 101 orang ASN (90 orang PNS dan 11 PPPK) dan 37 PPNPN. Sebaran pegawai terdapat di Bagian Program Evaluasi, Hukum, dan Kerjasama Teknik sebanyak 41 pegawai, sedangkan di Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana sebanyak 97 pegawai.

Tabel 2. Sebaran Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE 2023

Bagian	PNS	P3K	PPNPN
PEHKT	30 orang	5 orang	6 orang
KKOTL	60 orang	6 orang	31 orang
<b>Total</b>	<b>90 orang</b>	<b>11 orang</b>	<b>37 orang</b>

Tabel 3. Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE 2023  
Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Bagian PEHKT	Bagian KKOTL
Struktural	1 orang (Kepala Bagian PEHKT)	4 orang • Dirjen KSDAE • Sekditjen KSDAE • Kepala Bagian KKOTL • Kasubbag TU
Pelaksana	13 orang	39 orang
Fungsional		
a. Analis Kebijakan	3 orang	-
b. Analis Hukum	3 orang	-
c. Perencana	6 orang	-
d. Perancang Peraturan Perundang-undangan	3 orang	-
e. Pranata Humas	2 orang	1 orang
f. Pranata Komputer	4 orang	1 orang
g. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	-	1 orang
h. Arsiparis	-	5 orang
i. Analis SDM Aparatur/Analis Kepegawaian	-	14 orang
j. Analis Pengelolaan Keuangan APBN	-	1 orang

Tabel 4. Pegawai Sekretariat Jenderal KSDAE Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Bagian PEHKT	Bagian KKOTL
S-3	2 orang	1 orang ( Dirjen KSDAE)
S-2	10 orang	15 orang
S-1 / D-IV	20 orang	22 orang
D-III	3 orang	16 orang
SLTA	-	11 orang
SLTP	-	1 orang

Sesuai tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE menyelenggarakan administrasi kepegawaian sebanyak 6.400 pegawai termasuk 101 pegawai pada Sekretariat Direktorat Jenderal.

#### D. Aset

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE secara bertahap melakukan penambahan sarana dan prasarana. Aset atau Barang Milik Negara (BMN) intrakomptabel yang dikelola Setditjen KSDAE per 31 Desember 2023 mencapai Rp. 66.092.765.160,-

Secara lebih rinci BMN intrakomptabel Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2023 terdiri atas:

##### 1. Aset Lancar

Aset lancar adalah aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Adapun nilai aset lancar Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.138.007.980,-.

##### 2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung bangunan, dan aset tetap lainnya. Adapun nilai aset tetap Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 64.943.071.480,-.

##### 3. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset lancar dan aset tetap yang berupa aset tak berwujud, aset lain-lain dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan. Adapun nilai aset lainnya Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE per 31 Desember 2023 sebesar Rp.11.685.700,-.





[@cecepSetiawan/Manusela](#)

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis Sekretariat Ditjen KSDAE

Tahun 2023 merupakan tahun ke empat dalam pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2020-2024. Lingkup Ditjen KSDAE, pelaksanaan kegiatan pembangunan masih mengacu kepada visi, misi, tujuan pembangunan yang selaras dengan visi dan misi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tabel 5. Rencana Strategis Sekretariat Ditjen KSDAE

Visi Direktorat Jenderal KSDAE	"Terwujudnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati untuk Kesejahteraan Masyarakat" yang mendukung "Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat" dalam mendukung "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".
Rumusan Misi Direktorat Jenderal KSDAE dan mendukung Misi KLHK	MEWUJUDKAN: Hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas untuk perlindungan keanekaragaman hayati; Mengoptimalkan manfaat ekonomi secara berkeadilan dan berkelanjutan dari tumbuhan dan satwa liar serta jasa lingkungan Kawasan konservasi; keberdayaan masyarakat dalam akses Kelola Kawasan Konservasi baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; tata kelola Kawasan konservasi yang baik dan efektif.
Tujuan Pembangunan Hutan Konservasi Direktorat Jenderal KSDAE	MENINGKATKAN: kualitas pengelolaan Kawasan konservasi sebagai ruang perlindungan keanekaragaman hayati; manfaat ekonomi dari Kawasan konservasi melalui pemanfaatan TSL dalam mendukung peningkatan nilai ekspor, kualitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi; mengoptimalkan manfaat hutan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat; kualitas pengelolaan Ekosistem Esensial sebagai ruang perlindungan keanekaragaman hayati di luar Kawasan Konservasi; dan tata kelola pembangunan hutan konservasi.
Sasaran Direktorat Jenderal KSDAE	MENINGKATNYA: Pengelolaan Kawasan Konservasi; Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan; PNPB dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari; Kemitraan Konservasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi; Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial; dan Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem.
Program	Dukungan Manajemen
Kegiatan	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target pada akhir tahun 2024: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal KSDAE minimal 80,00 Poin</li> <li>2. Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal KSDAE mencapai level 4</li> <li>3. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal KSDAE yang tertib dan akuntabel 1 Dokumen</li> </ol>
----------------------------------	---

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2023

<b>Kegiatan</b>	<b>Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal KSDAE</b>	
<b>Sasaran Kegiatan</b>	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE	
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE	79,5 Poin
	Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal KSDAE	Level SPIP: 3
	Laporan Keuangan Direktorat Jenderal KSDAE	1 Dokumen
<b>Output</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 5419.EBA.962 - Layanan Umum</li> <li>2. 5419.EBA.994 - Layanan Perkantoran</li> <li>3. 5419.EBB.951 - Layanan Sarana Internal</li> <li>4. 5419.EBB.971 - Layanan Prasarana Internal</li> </ol>	
<b>Anggaran</b>	Rp. 74.392.253.000,-	

## B. Rencana Kerja Sekretariat Ditjen KSDAE

Perencanaan Kinerja Sekretariat Ditjen KSDAE tahun 2023 telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE Nomor SK.150/SET.3/PEHKT/REN.2/12/2022 tentang Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2023. Sedangkan penentuan kinerja tahunan telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Sekretaris Direktorat Jenderal dengan Direktur Jenderal KSDAE.

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE dengan penanggung jawab kegiatan Sekretariat Ditjen KSDAE memiliki sasaran kegiatan yaitu Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Dalam mendukung Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya terdapat Indikator Kinerja Program (IKP) di Direktorat Jenderal KSDAE yaitu: Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem minimal 79,5 Poin.

Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen KSDAE tahun 2023 didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dijabarkan pada Renstra (Revisi) Ditjen KSDAE Tahun 2020-2024, pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE, yaitu:

1. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 80,00 poin dan pada tahun 2023 target kinerja adalah sebesar 79,5 poin
2. Level maturitas SPIP 3 level
3. Laporan keuangan Ditjen KSDAE sebanyak 1 dokumen.



### C. Pagu Anggaran Tahun 2023

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE, telah dialokasikan anggaran untuk tahun anggaran 2023 yang digunakan untuk pemenuhan belanja operasional dan non operasional. Anggaran belanja operasional digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan layanan perkantoran yang meliputi belanja pegawai dan operasional perkantoran sedangkan belanja non operasional digunakan untuk membiayai kegiatan teknis yang bersifat prioritas nasional dan kegiatan lainnya sesuai dengan Rencana Kerja Sekretariat Ditjen KSDAE.

Berdasarkan pagu anggaran tahun 2023, alokasi anggaran Sekretariat Ditjen KSDAE adalah Rp. 92.407.012.000 dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 7. Pagu Anggaran Setditjen KSDAE 2023

No	Bagian	Pagu Anggaran (Rp)	Persentase (%)
<b>I</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>56.265.371.000</b>	<b>60,88</b>
<b>II</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>31.826.936.000</b>	<b>34,44</b>
A	Operasional	11.593.450.000	12,54
B	Non Operasional	20.233.486.000	21,89
1	Bagian PEHKT	11.733.486.000	12,69
2	Bagian KKOTL	8.500.000.000	9,19
<b>III</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>4.314.705.000</b>	<b>4,66</b>
	<b>Jumlah I+II+III</b>	<b>92.407.012.000</b>	<b>100.00</b>

Sumber: Renja Sekretariat Ditjen KSDAE 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selama tahun 2023 alokasi terbesar anggaran Sekretariat Ditjen KSDAE yaitu pada belanja pegawai yang mencapai 60,88% dari total anggaran. diikuti belanja barang sebesar 34,44% dan belanja modal sebesar 4,66%.

Pada tahun 2023 pagu anggaran pada Kantor Pusat khususnya Sekretariat Ditjen KSDAE mengalami 33 kali revisi anggaran (15 revisi POK, 5 Dit. PA, 1 Kantor Wilayah dan 12 di DJA), sehingga pada akhir tahun 2023 pagu anggaran Sekretariat Ditjen KSDAE adalah sebesar Rp. 74.392.253.000,-, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8. Pagu Anggaran Setditjen KSDAE 2023 Setelah Revisi

No	Bagian	Pagu Anggaran (Rp)	Persentase (%)
<b>I</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>38.496.415.000</b>	<b>51,75</b>
<b>II</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>31.613.838.000</b>	<b>42,50</b>
A	Operasional	11.593.450.000	15,58
B	Non Operasional	20.020.388.000	26,91
1	Bagian PEHKT	11.483.088.000	15,44
2	Bagian KKOTL	8.537.300.000	11,48
<b>III</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>4.282.000.000</b>	<b>5,76</b>
	<b>Jumlah I+II+III</b>	<b>74.392.253.000</b>	<b>100,00</b>



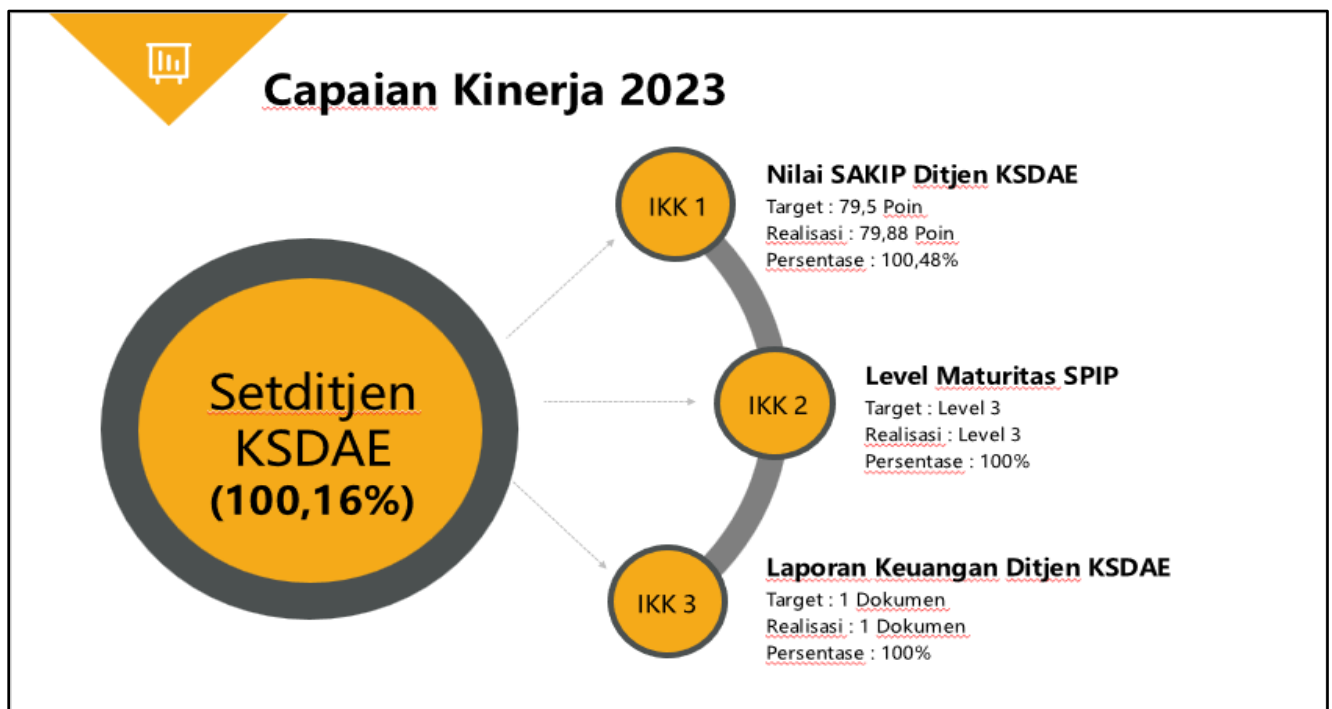
Air Terjun Karawawi di CA. Peg.  
KumawaDokumentasi: BBKSDA Papua Barat



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja

Pada tahun 2023, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE melaksanakan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE dengan sasaran kegiatan terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023 yaitu Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE dengan target sebesar 79,50 poin, Laporan Keuangan Ditjen KSDAE sebanyak 1 dokumen dan level maturitas sistem pengendalian intern pemerintah pada level 3.



Gambar 1. Capaian Kinerja Setditjen KSDAE 2023

Tabel 9. Capaian Kinerja Kegiatan Setditjen KSDAE Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)			Target dan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKK 1	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE (Poin)	Target	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00
		Capaian	79,37	80,02	79,12	79,88	-
IKK 2	Level Maturitas SPIP (Level Maturitas)	Target	3	3	3	3	4
		Capaian	3 (3,358)	3 (3,910)	3 (3,50)	3 (3,70)	-
IKK 3	Laporan Keuangan Ditjen KSDAE	Target	1	1	1	1	1
		Capaian	1	1	1	1	-

## 1. Indikator Kinerja Kegiatan Nilai SAKIP Ditjen KSDAE.

Pengukuran nilai SAKIP dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE dihasilkan dari kegiatan evaluasi atas penerapan SAKIP pada tingkat Eselon I dan Eselon II Pusat. Penilaian tersebut dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal KLHK setiap tahunnya. Pengukuran capaian kinerja sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE dilakukan dengan membandingkan target sasaran yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Hasil pengukuran tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 10. Capaian IKK Nilai SAKIP Ditjen KSDAE Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	79,50	79,88	100,57

Berdasarkan hasil evaluasi penerapan SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KLHK tahun 2023 sesuai dengan surat Inspektur Jenderal KLHK Nomor SP.57/ITJEN/ITWIL.I/RHS/WAS.3/4/2023 tanggal 18 April 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, bahwa nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE yang merupakan akumulasi dari nilai evaluasi manajemen kinerja pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Jenderal dan Direktorat Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE sebesar 79,88 poin. Pencapaian nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 79,88 poin telah melebihi target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 79,50 poin.

## Hasil Penilaian SAKIP Tahun 2023 (79,88)

Perencanaan Kinerja +  
√ Nilai Skor : 24,53

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal +  
√ Nilai Skor : 23,33



Pengukuran Kinerja +  
√ Nilai Skor : 20,68

Pelaporan Kinerja +  
√ Nilai Skor : 11,32

Gambar 2. Hasil Penilaian SAKIP 2023

## Kelemahan Hasil Evaluasi SAKIP Ditjen KSDAE 2023

### Perencanaan Kinerja

1. Perencanaan kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar yang baik
2. Perencanaan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

### Pengukuran Kinerja

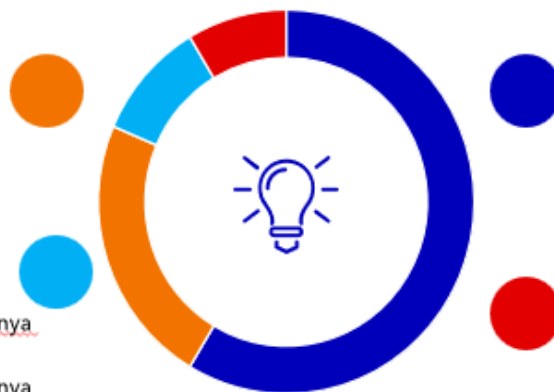
1. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar yang baik
2. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien
3. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment

### Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dilaksanakan secara berkualitas..
2. Implementasi SAKIP belum sepenuhnya meningkatkan

### Pelaporan Kinerja

1. Dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar atas pencapaian kinerja.
2. Pelaporan kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak dalam penyesuaian kebijakan
3. Informasi laporan kinerja belum sepenuhnya memengaruhi budaya kerja



Gambar 3. Kelemahan Hasil Penilaian SAKIP 2023

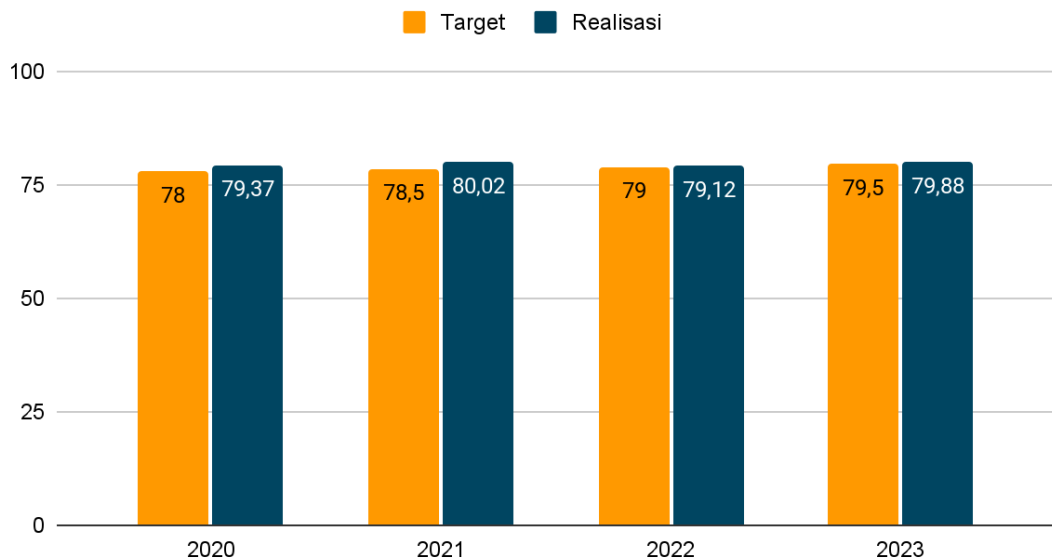


Hasil Rekomendasi Inspektorat Jenderal KLHK terhadap SAKIP Ditjen KSDAE 2023 yaitu:

1. Menetapkan pedoman penghitungan capaian IKP-IKK lingkup Direktorat Jenderal KSDAE dan melakukan pengawasan capaian IKP tersebut
2. Lebih cermat dalam menetapkan nilai target kinerja tahunan dalam Perjanjian Kinerja (PK) agar selaras dengan Renja dan Renstra Ditjen KSDAE
3. Di lingkup Sekretariat Ditjen KSDAE agar: melengkapi bukti dokumen bahwa setiap pegawai merumuskan dan menetapkan PK, melengkapi bukti dokumen bahwa setiap pegawai telah menyusun dan menandatangani SKP tahun 2022, dalam pengukuran capaian kinerja agar dapat menggunakan aplikasi yang sudah tersedia ataupun dibuat oleh pihak lain, dan melengkapi hasil survei dari stakeholder/para pihak.
4. Di lingkup Direktorat PJLKK agar: melakukan penelaahan atas metode verified atas capaian IKK yang tertuang dalam Rencana Strategis 2020-2024 dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing IKK dan capaiannya; menyusun dan menetapkan pedoman teknis pengukuran kinerja untuk capaian masing-masing IKK pada Rencana Strategis 2020-2024; serta meninjau kembali/menentukan *bridging reasoning* lokasi untuk capaian IKK 4 kawasan yang pengelolaannya bukan satker KSDAE yaitu KHDTK Aek Nauli dan Hutan Pendidikan Wanagama; serta menyajikan informasi tentang analisa efisiensi penggunaan sumber daya, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja dalam Laporan Kinerja.
5. Di lingkup Direktorat KKHSG agar meningkatkan pengawalan capaian kinerja pada periode berikutnya sesuai dengan target Renstra dan Renja.
6. Di lingkup Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi agar melakukan penelaahan atas IKK 3 yang memiliki target yang sama mulai 2023 s.d 2024 yang tertuang dalam Rencana Strategis 2020-2024.
7. Di lingkup Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi agar memperbaiki Perjanjian Kinerja tahun 2023 sesuai dengan Renstra 2020-2024 (revisi) dan Renja 2023.

Nilai SAKIP Ditjen KSDAE mempunyai nilai yang berfluktuatif. Dalam 4 tahun terakhir, nilai tertinggi pada tahun 2021.

## Nilai SAKIP Ditjen KSDAE 2020-2023



Gambar 4. Perbandingan Nilai SAKIP 2020-2023

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) nilai SAKIP Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) merupakan salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. IKK ini memiliki target kinerja 5 tahunan, yaitu sebesar 80 poin. Pada tahun 2023, capaian IKK nilai SAKIP Ditjen KSDAE sebesar 79,88 poin. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 0,76 poin dari capaian tahun sebelumnya, yaitu sebesar 79,12 poin.

Peningkatan capaian IKK nilai SAKIP Ditjen KSDAE pada tahun 2023 disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Komitmen dan kerja keras seluruh jajaran Ditjen KSDAE dalam melaksanakan reformasi birokrasi.
2. Implementasi berbagai kebijakan dan program reformasi birokrasi yang efektif dan efisien.

Berdasarkan target kinerja 5 tahunan, capaian IKK nilai SAKIP Ditjen KSDAE pada tahun 2023 masih belum mencapai target 5 tahun tetapi sudah melebihi target tahunan dengan capaian 100,57%. Untuk mencapai target kinerja 5 tahunan, Ditjen KSDAE perlu terus meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai upaya, antara lain:

1. Meningkatkan komitmen dan kerja keras seluruh jajaran Ditjen KSDAE dalam melaksanakan reformasi birokrasi.
2. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan capaian IKK nilai SAKIP Ditjen KSDAE dapat mencapai target kinerja 5 tahunan, yaitu sebesar 80 poin.

Perbandingan capaian kinerja IKK Nilai SAKIP Ditjen KSDAE Tahun 2023 dengan target kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Perbandingan Nilai SAKIP 2022-2023

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2022	79	79,12	100,15
2	2023	79,5	79,88	100,57

Berdasarkan Laporan Nilai SAKIP KSDAE tahun 2023, capaian kinerja IKK Nilai SAKIP Ditjen KSDAE Tahun 2023 adalah sebesar 79,88 poin, atau 100,57% dari target kinerja sebesar 79,5 poin. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 0,76 poin dari capaian kinerja tahun sebelumnya sebesar 79,12 poin.

Dari diagram tersebut dapat dilihat bahwa capaian kinerja IKK Nilai SAKIP Ditjen KSDAE Tahun 2023 sudah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Namun, terdapat peningkatan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Ditjen KSDAE telah melakukan upaya-upaya yang signifikan untuk meningkatkan kinerja reformasi birokrasinya

Kualitas data capaian kinerja Nilai SAKIP Ditjen KSDAE sangat baik. Hal ini terlihat dari konsistensi data yang dilaporkan kepada Inspektorat Jenderal KLHK dari tahun ke tahun untuk capaian kinerja diatas 100%. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas data capaian kinerja Nilai SAKIP Ditjen KSDAE, yaitu:

1. Akurasi data merupakan faktor penting dalam penilaian kinerja. Data yang tidak akurat dapat menyebabkan penilaian kinerja menjadi bias. Untuk meningkatkan akurasi data capaian kinerja Nilai SAKIP Ditjen KSDAE, perlu dilakukan verifikasi dan validasi data secara berkala.
2. Data yang lengkap dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja suatu organisasi. Untuk meningkatkan kelengkapan data capaian kinerja Nilai SAKIP Ditjen KSDAE, perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan kepada unit kerja terkait mengenai pengumpulan dan pelaporan data.
3. Data yang terkini dapat memberikan gambaran yang lebih realistis tentang kinerja suatu organisasi. Untuk meningkatkan kebaruan data capaian kinerja Nilai SAKIP Ditjen KSDAE, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi

Ada beberapa kendala yang dihadapi Ditjen KSDAE dalam pencapaian capaian kinerja Nilai SAKIP, yaitu:

1. Ketersediaan sumber daya, seperti anggaran dan SDM, merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.



Keterbatasan ketersediaan sumber daya dapat menjadi kendala dalam pencapaian capaian kinerja Nilai SAKIP Ditjen KSDAE.

2. Perubahan regulasi yang sering terjadi dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi. Ditjen KSDAE perlu melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang baru agar dapat melaksanakan kegiatan reformasi birokrasi secara efektif dan efisien.
3. Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran merupakan faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi. Ditjen KSDAE perlu meningkatkan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran untuk meningkatkan kinerja reformasi birokrasi.

Berdasarkan analisis terhadap kualitas data capaian kinerja Nilai SAKIP Ditjen KSDAE dan kendala pencapaiannya, berikut adalah rekomendasi untuk peningkatan kinerja Nilai SAKIP Ditjen KSDAE di masa yang akan datang:

1. Meningkatkan akurasi, kelengkapan, dan kebaruan data capaian kinerja Nilai SAKIP Ditjen KSDAE.
2. Meningkatkan ketersediaan sumber daya, seperti anggaran dan SDM, untuk pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.
4. Meningkatkan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran untuk meningkatkan kinerja reformasi birokrasi.

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam pencapaian kinerja IKK Nilai SAKIP Ditjen KSDAE. Sumber daya yang dimaksud meliputi:

1. Anggaran  
Anggaran merupakan salah satu sumber daya yang paling penting dalam pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi. Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja IKK Nilai SAKIP Ditjen KSDAE, dapat dilakukan beberapa hal berikut:
  - a. Melakukan perencanaan anggaran yang lebih realistis dan terukur.
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala.
  - c. Melakukan efisiensi dan efektivitas belanja anggaran
2. Sumber Daya Manusia  
Sumber Daya Manusia merupakan sumber daya yang penting dalam pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi. Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia dalam pencapaian kinerja IKK Nilai SAKIP Ditjen KSDAE, dapat dilakukan beberapa hal berikut:
  - a. Melakukan peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM.
  - b. Melakukan optimalisasi pemanfaatan SDM.
  - c. Melakukan penataan sistem kerja yang lebih efisien

Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja IKK Nilai SAKIP Ditjen KSDAE, perlu dilakukan upaya-upaya berikut yaitu:

- a. Peningkatan kesadaran dan komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran Ditjen KSDAE untuk menggunakan sumber daya secara efisien.
- b. Penerapan sistem dan prosedur yang efektif dan efisien dalam pengelolaan sumber daya.
- c. Peningkatan teknologi informasi untuk mendukung efisiensi pengelolaan sumber daya

Berdasarkan analisis terhadap capaian kinerja Nilai SAKIP Ditjen KSDAE Tahun 2023, berikut adalah rekomendasi untuk perbaikan kinerja Nilai SAKIP Ditjen KSDAE di masa yang akan datang:

1. Meningkatkan kualitas data capaian kinerja Nilai SAKIP Ditjen KSDAE
2. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya
3. Meningkatkan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Ditjen KSDAE
4. Melakukan benchmarking dengan unit kerja lain yang memiliki kinerja sama
5. Meningkatkan dukungan dari Eselon II lingkup Ditjen KSDAE untuk dukungan data capaian kinerja.

## **2. Indikator Kinerja Kegiatan Level Maturitas SPIP Ditjen KSDAE.**

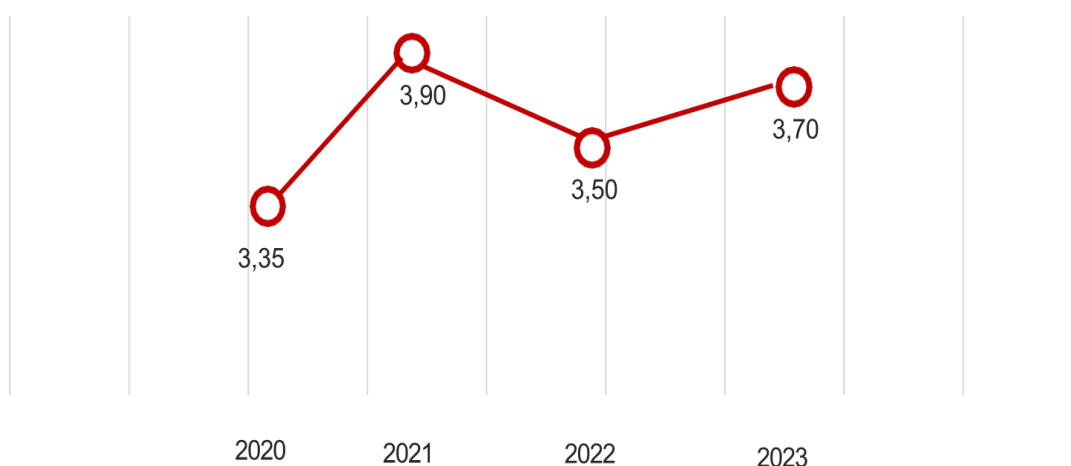
Tingkat maturitas SPIP merupakan tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Tingkat maturitas menunjukkan kualitas proses pengendalian terintegrasi dalam pelaksanaan tindakan manajerial dan kegiatan teknis instansi pemerintah. Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP diharapkan memberikan gambaran mengenai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah. Pengukuran Nilai Maturitas SPIP Ditjen KSDAE berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L.

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Direktorat Jenderal KSDAE melaksanakan kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem (SPIP) Tahun 2023. Kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP ini terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu: 1. Persiapan, 2. Pelaksanaan, dan 3. Pelaporan.

Direktorat Jenderal KSDAE telah menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan diantaranya melalui sosialisasi awal SPIP dan reviu atas tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP, diskusi kepada *assessor*, pengumpulan

dan pengujian bukti dokumen atas pelaksanaan 25 sub unsur SPIP, reviu peta risiko dan analisis risiko, pelaksanaan wawancara dan observasi.

Setelah seluruh tahapan tersebut dilaksanakan, Direktorat Jenderal KSDAE melakukan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Tahun 2023 dan setelah itu akan dilaksanakan Penjaminan Kualitas oleh Inspektorat Jenderal KLHK, kemudian hasil dari seluruh Eselon I akan dikompilasi dan dilakukan Penilaian Maturitas untuk menjadi nilai Maturitas lingkup KLHK. Hasil yang dipergunakan sebagai Nilai Maturitas Eselon I tahun 2023 sesuai dengan kesepakatan dengan Inspektorat Jenderal KLHK bahwa nilai yang akan input yaitu nilai Penilaian Mandiri Maturitas KLHK. berdasarkan Laporan Hasil Atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023, nilai Maturitas penyelenggaraan SPIP yaitu sebesar 3,70 atau berada dalam level 3 (pengendalian intern yang efektif).



Gambar 5. Perbandingan Nilai Level Maturitas 2020-2023

Target kinerja Level Maturitas SPIP Ditjen KSDAE Tahun 2023 adalah level 3. Target ini berada pada level yang sama dengan target Level Maturitas SPIP Ditjen KSDAE Tahun 2020, 2021 dan 2022.

Dari gambar tersebut diatas dapat dilihat bahwa capaian Level Maturitas SPIP Ditjen KSDAE Tahun 2023 sudah memenuhi target kinerja Tahun 2023. Nilai Penyelenggaraan Maturitas SPIP dihasilkan oleh beberapa faktor yaitu

1. Penetapan Kinerja masih berorientasi pada output dan belum pada outcome sehingga belum sepenuhnya dapat berperan kepada dampak pada target yang ditetapkan dalam renstra.
2. Proses cascading Sasaran Strategis terhadap Sasaran Program belum memenuhi kaidah adanya hubungan sebab-akibat.
3. Peningkatan komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran Ditjen KSDAE untuk meningkatkan kinerja SPIP.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan SPIP yang dilaksanakan oleh Ditjen KSDAE.



Berdasarkan hasil analisis capaian level maturitas 2020-2023, untuk peningkatan perbaikan kinerja Level Maturitas SPIP Ditjen KSDAE menuju level 4 direkomendasikan:

1. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar unit kerja di Ditjen KSDAE dalam pelaksanaan kegiatan SPIP
2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan kegiatan SPIP, seperti audit internal, reviu internal, dan monitoring.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan SPIP.
4. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman pegawai mengenai pentingnya SPIP.
5. Meningkatkan dukungan dari pimpinan dan seluruh jajaran organisasi Ditjen KSDAE.

### **3. Indikator Kinerja Kegiatan Laporan Keuangan Ditjen KSDAE.**

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bentuk pertanggungjawaban dimaksud yaitu dengan menyusun laporan keuangan yang terdiri Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Unit Akuntansi Penggunaan Anggaran (UAKPA) dibawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terdiri dari 75 (tujuh puluh lima) satuan kerja yang terdiri dari Kantor Pusat, Balai Besar/Balai KSDA dan Taman Nasional.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat dan akuntabel.

Pada tahun 2023 telah disusun Laporan Keuangan Periode Tahunan Tahun Anggaran 2022 (Unaudited dan Audited) serta Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2023. Laporan keuangan disusun dengan berpedoman Kualitas Laporan Keuangan yang baik adalah yang dapat menyampaikan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan negara. Laporan Keuangan Ditjen KSDAE senantiasa memberikan kontribusi positif pada pemberian opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan yang sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Indikator pemberian opini ini pada penyusunan laporan keuangan dinilai berdasarkan penerapan sistem pengendalian internal yang memadai serta progres tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI.

Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen KSDAE Tahun 2022, merupakan penyusunan Laporan Keuangan pertama kali dengan menerapkan Aplikasi SAKTI full module, setelah tahun-tahun sebelumnya hingga tahun 2021 menggunakan aplikasi desktop SAIBA, SIMAK BMN dan Persediaan. Dalam proses peralihan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi ini, Ditjen KSDAE mengalami kendala proses migrasi data yang belum sempurna, sehingga menyebabkan beberapa perbaikan dan penyesuaian data transaksi keuangan dan BMN agar dapat menyajikan laporan keuangan secara akuntabel.

Sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini, total Aset dan Kewajiban pada Neraca Ditjen KSDAE mengalami naik/turun. Sebagaimana pada tahun 2021 nilai total aset mengalami penurunan dari tahun 2020 yang antara lain disebabkan berkurangnya belanja yang membentuk aset serta adanya penghapusan aset dikarenakan rusak berat. Sedangkan tahun 2022 mengalami kenaikan antara lain disebabkan meningkatnya belanja modal yang membentuk aset, adanya proyek SBSN senilai Rp. 99.642.746.000,- pada 2 satker yaitu BTN Ujung Kulon dan BKSDA Maluku.

Tabel 12. Neraca Ditjen KSDAE

AKUN	2020	2021	2022
Aset Lancar	23.055.900.886	20.168.362.959	21.139.332.480
Aset Tetap	3.663.114.691.729	3.654.775.387.973	3.666.182.867.102
Aset Lainnya	43.566.063.335	41.723.838.035	47.569.833.951
Total Aset	3.729.736.655.950	3.716.667.588.967	3.734.892.033.533
Kewajiban	960.320.066	1.897.461.682	2.080.138.403
Ekuitas	3.728.869.125.972	3.732.872.433.333	3.714.830.332.540
Total Kewajiban dan Ekuitas	3.729.829.446.038	3.724.769.895.015	3.716.910.470.943

## B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2023 sebesar Rp. 74.392.253.000,-. Dalam perjalanan anggaran tahun 2023, pagu anggaran Kantor Pusat mengalami 33 kali revisi anggaran (15 revisi POK, 5 Dit. PA, 1 Kantor Wilayah dan 12 di DJA). Berdasarkan jenis belanja, proporsi anggaran tertinggi ke yang terendah berturut-turut yaitu belanja pegawai untuk seluruh pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal KSDAE sebesar 51,75%, belanja barang non operasional sebesar 26,91%, belanja barang operasional sebesar 15,58% dan belanja modal sebesar 5,76%.

Anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE terbagi menjadi 4 output kegiatan. Proporsi terbesar yaitu anggaran untuk layanan perkantoran berupa belanja gaji pegawai dan belanja barang operasional perkantoran sebesar 67,33%, berturut-turut berikutnya yaitu anggaran layanan umum sebesar 26,91%, anggaran layanan sarana internal sebesar 5,16% dan anggaran layanan prasarana internal sebesar 0,59% yang merupakan belanja modal peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan.

Sampai dengan akhir tahun 2023, realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE adalah sebesar Rp. 73.428.143.882,- atau sebesar 98,70%. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 72.466.355.000,- atau 93,26%, realisasi anggaran tahun 2023 mengalami peningkatan 5,44 %.

Berdasarkan komponen kegiatan yang dilaksanakan, realisasi Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE yang tertinggi adalah komponen Kendaraan Operasional Setditjen KSDAE sebesar 100%, dan diikuti oleh komponen Belanja Operasional Ditjen dan Setditjen KSDAE sebesar 100%. Realisasi terkecil yaitu komponen Operasional dan Pemeliharaan Kantor sebesar 96,39%, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 13. Pagu dan realisasi anggaran Setditjen KSDAE 2023

No	Rincian Output	Komponen	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Layanan Umum	Penyusunan Program, Anggaran, Evaluasi, Data dan Informasi	8.339.256.000	8.335.080.133	99,95
		Hukum dan Kerjasama Teknik	3.143.832.000	3.140.039.916	99,88
		Pengelolaan Kepegawaian, Jabfung, dan Ortala	3.023.068.000	3.020.771.522	99,92
		Pengelolaan Keuangan dan Umum	5.514.232.000	5.509.174.715	99,91



No	Rincian Output	Komponen	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2	Layanan Perkantoran	Gaji dan Tunjangan	38.496.415.000	37.903.443.248	98,46
		- Belanja Operasional Ditjen dan Setditjen KSDAE	11.593.450.000	11.237.965.508	96,93
3	Layanan Sarana Internal	- Kendaraan Operasional Setditjen KSDAE	1.865.800.000	1.865.800.000	100
		- Pengadaan Perangkat Pengolah Data Setditjen KSDAE	1.587.932.000	1.587.602.400	99,98
		- Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Setditjen	388.049.000	388.048.370	100,00
4	Layanan Prasarana Internal	Penataan Kantor Setditjen KSDAE Bogor	440.219.000	440.218.070	100
<b>JUMLAH</b>			<b>74.392.253.000</b>	<b>73.428.143.882</b>	<b>98,70</b>

Sumber: Aplikasi Sakti Kantor Pusat Ditjen KSDAE, Januari 2024

Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja dari yang terbesar yaitu belanja modal sebesar 100%, belanja barang (52) sebesar 98,83 % dan belanja pegawai sebesar 98,46 % sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 14. Pagu dan realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja

No	Bagian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
<b>I</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>38.496.415.000</b>	<b>37.903.443.248</b>	<b>98,46</b>
<b>II</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>31.613.838.000</b>	<b>31.243.031.794</b>	<b>98,83</b>
A	Operasional	11.593.450.000	11.237.965.508	96,93
B	Non Operasional	20.020.388.000	20.005.066.286	99,92
1	Bagian PEHKT	11.483.088.000	11.475.120.049	99,93
2	Bagian KKOTL	8.537.300.000	8.529.946.237	99,91
<b>III</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>4.282.000.000</b>	<b>4.281.668.840</b>	<b>100</b>
	<b>Jumlah I+II+III</b>	<b>74.392.253.000</b>	<b>73.428.143.882</b>	<b>98,70</b>

Berdasarkan 4 output kegiatan yang dilaksanakan, realisasi Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE yang tertinggi adalah kegiatan layanan prasarana internal sebesar 100%, kegiatan layanan sarana internal sebesar 99,99%, kegiatan layanan umum sebesar 99,92% dan kegiatan layanan perkantoran sebesar 98,11%. Rincian realisasi anggaran berdasarkan output adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Pagu dan realisasi anggaran berdasarkan output

Kode	Output	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
EBA.994	Layanan Perkantoran	50.089.865.000	49.141.408.756	98,11
EBA.962	Layanan Umum	20.020.388.000	20.005.066.286	99,92
EBB.951	Layanan Sarana Internal	3.841.781.000	3.841.450.770	99,99
EBB.971	Layanan Prasarana Internal	440.219.000	440.218.070	100
	<b>Jumlah</b>	<b>74.392.253.000</b>	<b>73.428.143.882</b>	<b>98,67</b>

Nilai kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE berada pada angka 100,16% yang diperoleh dari 3 capaian indikator kinerja yaitu nilai SAKIP 100,48%, level maturitas SPIP 100% dan laporan keuangan Ditjen KSDAE 100%. Apabila angka capaian kinerja disandingkan dengan realisasi anggaran sebesar 98,67 % maka diperoleh nilai rasio efisiensi sebesar 0,99. Angka ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dalam pencapaian target kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal dalam mendukung tata kelola Direktorat Jenderal KSDAE dipandang efektif dan efisien.

Nilai Kinerja Anggaran Kantor Pusat Ditjen KSDAE yaitu 87,77 Nilai kinerja anggaran merupakan gabungan dari nilai evaluasi kinerja anggaran dari aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (Smart) dengan bobot 50

persen serta nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) dengan bobot 50 persen.

### C. Dukungan Terhadap Prioritas Nasional



Direktorat Jenderal KSDAE mendukung 3 Prioritas Nasional, yaitu PN 1, PN 2 dan PN6. Dalam Pelaksanaannya Ditjen KSDAE dibantu oleh UKE II lingkup Ditjen KSDAE dalam pencapaian kegiatan tahun 2023.

### D. Pemantauan Kegiatan Tematik

Pada tahun 2023, Direktorat Jenderal KSDAE mendapatkan mandat untuk turut berperan dalam mensukseskan kegiatan yang dipantau Kantor Staf Presiden (KSP) yaitu kegiatan Kebijakan kelautan Indonesia 2023. Selain itu terdapat pemantauan kegiatan aksi tematik KemenLHK yaitu Program Prioritas Nasional, Kegiatan Ibu Kota Negara (IKN), Kegiatan Daerah Perbatasan, Kegiatan Padat Karya, serta Kegiatan Pengelolaan Daerah Tertinggal.

#### 1. Pemantauan Kantor Staf Presiden

##### a) Kegiatan Kebijakan Kelautan Indonesia 2023

- Dasar Pemantauan : Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 berdasarkan Peraturan Presiden No 34 Tahun 2022.
- Ukuran Keberhasilan: Berkembangnya wisata alam bahari pada kawasan konservasi dan Tersedianya Dokumen Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Keanekaragaman Hayati Tinggi.
- Capaian : Jumlah destinasi wisata alam bahari Ditjen KSDAE di 3 lokasi yaitu:
  - a. BTN Kep Togean (pos media informasi wisata)
  - b. BTN Bunaken (Kapal Pengawas Wisata)
  - c. BTN Takabonerate (Pembangunan Wisma Tinabo).
- Capaian : Tersedianya Dokumen Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Keanekaragaman Hayati Tinggi Ditjen KSDAE di 7 lokasi yaitu: BTN Bunaken, BTN Takabonerate, BTN Kep Togean,



## 2. Aksi Tematik KemenLHK

Kegiatan Pelaksanaan Program Prioritas nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>● Dasar Pemantauan : Rencana strategis KemenLHK 2020-2024</li><li>● Ukuran Keberhasilan : Tercapainya Program Nasional 2023</li><li>● Capaian : Tercapainya realisasi anggaran dan kinerja Ditjen KSDAE pada PN 1, PN 2, dan PN 3.</li></ul>
Kegiatan Ibu Kota Negara (IKN)	<ul style="list-style-type: none"><li>● Dasar Pemantauan : Rencana strategis KemenLHK 2020-2024</li><li>● Ukuran Keberhasilan : Nilai kehati tinggi pada kawasan IKN dan Pemulihan Ekosistem di area IKN.</li><li>● Capaian : Tercapainya nilai kehati tinggi pada kawasan IKN seluas 68.000 Ha dan Pemulihan Ekosistem di area IKN seluas 500 Ha.</li></ul>
Kegiatan Daerah Perbatasan	<ul style="list-style-type: none"><li>● Dasar Pemantauan : Pasal 15 UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah negara dan Pasal 3 Perpres No. 12 Tahun 2010, Perpres 44 Tahun 2017 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan</li><li>● Ukuran Keberhasilan : Mendukung rencana pemerintah dalam rangka efektifitas Pengelolaan Perbatasan Negara sebagai halaman depan Negara yang berdaulat, berdaya saing dan aman.</li><li>● Capaian : tercapainya kegiatan perbatasan baik bantuan masyarakat, pembangunan dan patroli.</li></ul>
Kegiatan Padat Karya	<ul style="list-style-type: none"><li>● Dasar Pemantauan : Rencana strategis KemenLHK 2020-2024</li><li>● Ukuran Keberhasilan : Pelaksana program Padat Karya pada Ditjen KSDAE adalah 74 UPT yang terdiri dari 26 UPT KSDA dan 48 UPT Taman Nasional dengan kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung.</li><li>● Capaian : Kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung di 74 UPT lingkup Ditjen KSDAE</li></ul>
Kegiatan Pengelolaan Daerah Tertinggal	<ul style="list-style-type: none"><li>● Dasar Pemantauan : Perpres No 18 Tahun 2020</li><li>● Ukuran Keberhasilan : Pelaksanaan program Pengelolaan Daerah Tertinggal dengan karakteristik daerah lingkup Ditjen KSDAE</li><li>● Capaian : Tercapainya pelaksanaan program Pengelolaan Daerah Tertinggal dengan karakteristik daerah di empat satker lingkup Ditjen KSDAE yaitu BBKSDA Papua, BBKSDA Papua Barat, BTN Lorentz dan BTN Manupeu Tanadaru dan Laiwangi Wanggameti</li></ul>

## E. Capaian Rencana Kerja Setditjen KSDAE 2023

Untuk mencapai IKK Nilai SAKIP Ditjen KSDAE, Level Maturitas SPIP Ditjen KSDAE dan Laporan Keuangan Ditjen KSDAE didukung oleh 4 output yaitu: layanan umum, layanan perkantoran, layanan sarana internal dan layanan prasarana internal. Lebih detailnya seperti tabel dibawah ini:

Tabel 16. Layanan Perkantoran

Komponen	Capaian
Gaji dan tunjangan	Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai (ASN) sebanyak xxx pegawai jiwa selama 12 bulan dihitung mulai Januari sd Desember 2023 (lingkup Kantor Pusat Ditjen KSDAE)
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> <li>Operasional dan pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 28 unit (26 unit kendaraan operasional dan 2 unit kendaraan jabatan) dan roda 2 sebanyak 22 unit.</li> <li>Pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran sebanyak 159 unit (P.C unit 30 unit, A.C. 79 unit, Laptop 40 unit, dan Printer 10 unit).</li> <li>Pemeliharaan gedung dan bangunan sebanyak 1 unit.</li> <li>Operasional perkantoran lainnya yang meliputi langganan listrik, langganan air, langganan telepon, langganan internet, langganan penyimpanan data berbasis <i>cloud</i>, dan langganan aplikasi <i>video conference</i>.</li> </ol>

Tabel 17. Layanan Umum

Komponen	Capaian
Program, Anggaran, Evaluasi, Data dan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>RKAKL Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2024</li> <li>RKAKL Kantor Pusat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2024</li> <li>Laporan Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2022</li> <li>Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2022</li> <li>Laporan Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2023 (SMART - DJA)</li> <li>Laporan Capaian Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2023 (e-monev BAPPENAS)</li> <li>Laporan Pelaksanaan Anggaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2023 (SMART - DJA)</li> <li>Laporan Capaian Rencana Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2023 (e-monev BAPPENAS)</li> <li>Buku Statistik Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2022</li> <li>SIDAK dan Situation Room Ditjen KSDAE Tahun 2023</li> <li>Website Ditjen KSDAE Tahun 2023</li> <li>Medsos Ditjen KSDAE (IG, FB, Twitter, Youtube)</li> <li>Publikasi KSDAE pada website resmi Ditjen KSDAE dalam bentuk berita dan artikel pada tahun 2023 sebanyak 11.941 publikasi. Sedangkan untuk publikasi cetak pada tahun 2023 berupa buku yaitu buku Pariwisata Alam Nasional, buku saku dan publikasi dalam bentuk bahan pameran</li> </ol>
Pengelolaan Keuangan dan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Keuangan Eselon I Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2022 (<i>Audited</i> dan <i>Unaudited</i>)</li> <li>Laporan Keuangan Kantor Pusat Ditjen KSDAE Tahun 2022 (<i>Audited</i> dan <i>Unaudited</i>)</li> <li>Laporan Keuangan Eselon I Semester I Direktorat Jenderal KSDAE Tahun</li> </ol>

Komponen	Capaian
	<p>2023</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Laporan Keuangan Kantor Pusat Semester I Ditjen KSDAE Tahun 2023</li> <li>5. Laporan Keuangan Eselon I Triwulan III Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2023</li> <li>6. Laporan Keuangan Kantor Pusat Triwulan III Ditjen KSDAE Tahun 2023</li> <li>7. Tindak Lanjut LHA BPK RI yang diselesaikan sebanyak 68 rekomendasi dari total 104 rekomendasi, sehingga masih tersisa 38 rekomendasi. LHA Itjen yang diselesaikan sebanyak 17.048 rekomendasi dari 18.813 rekomendasi sehingga masih tersisa 1.789</li> <li>8. Penyusunan Laporan BMN Direktorat KSDAE Tahun 2022</li> <li>9. Penyusunan Laporan BMN Direktorat Jenderal KSDAE Semester I Tahun 2023</li> <li>10. Penyusunan Laporan BMN Kantor Pusat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2022</li> <li>11. Penyusunan Laporan BMN Kantor Pusat Direktorat Jenderal KSDAE Semester I Tahun 2023</li> <li>12. Rencana Kebutuhan BMN Kantor Pusat Ditjen KSDAE Tahun 2025</li> <li>13. Rencana Kebutuhan BMN Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2025</li> <li>14. Tindak Lanjut LHP BPK RI terkait Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) berupa proses penghapusan SKRT mencapai 74,91% atau sebanyak 15.420 unit senilai dari Rp.248.244.082.435,- dari total jumlah SKRT sebanyak 20.143 unit dengan nilai Rp.331.383.059.714,-</li> <li>15. Tindak Lanjut LHP BPK RI terkait persediaan belanja bantuan masyarakat yang dengan rincian telah terbit SK penghapusan terbit SK penghapusan sebesar Rp. 1.140.696.000,-, dalam proses penghapusan sebesar Rp. 3.734.716.390,- dan belum diusulkan penghapusan sebesar Rp.1.078.606.829,-.</li> <li>16. Tata persuratan selama tahun 2023 terdiri dari: surat masuk Setditjen KSDAE sebanyak 4796 surat, surat masuk Ditjen KSDAE sebanyak 5226 surat, surat keluar Setditjen KSDAE sebanyak 4678 surat, dan surat keluar Ditjen KSDAE sebanyak 2255 surat.</li> </ol>
Hukum dan Kerjasama Teknik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Draft/Rancangan Peraturan Pemerintah sebanyak 3 (tiga) rancangan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan;</li> <li>b. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Cagar Biosfer; dan</li> <li>c. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peran Serta Masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.</li> </ol> </li> <li>2. Peraturan Menteri LHK yang telah diundangkan sebanyak 2 (dua) dokumen, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 890);</li> <li>b. Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 941).</li> </ol> </li> <li>3. Draf/Rancangan Peraturan Menteri LHK yang telah disusun di tahun 2023 sebanyak 14 (empat belas) dokumen, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi.</li> <li>b. Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> </ol> </li> </ol>



Komponen	Capaian
	<p>tentang Tata Cara Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru.</p> <p>c. Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penyelenggaraan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Konservasi.</p> <p>d. Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Resor Wilayah pada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.</p> <p>e. Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru.</p> <p>f. Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.</p> <p>g. Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.</p> <p>h. Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.</p> <p>i. Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penyelamatan Satwa.</p> <p>j. Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.</p> <p>k. Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.</p> <p>l. Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Lembaga Konservasi.</p> <p>m. Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi.</p> <p>n. Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.</p> <p>4. Instrumen Hukum berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) Direktur Jenderal KSDAE sebanyak 2 (dua) dokumen, yaitu:</p> <p>a. Standar Operasional Prosedur Nomor: SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/1/2023 tentang Pengawasan Penaatan Perizinan Berusaha Kegiatan Konservasi Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;</p> <p>b. Standar Operasional Prosedur Nomor: SOP.2/KSDAE/SET.3/KSA.2/6/2023 tentang Penyelamatan Satwa Liar Hidup Temuan, Sitaan, dan Rampasan Hasil Penegakan Hukum.</p> <p>5. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:</p> <p>a. untuk Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun pada Kawasan</p>

Komponen	Capaian
	<p>Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru, dilaksanakan di Balai Taman Nasional Alas Purwo pada tanggal 20 Desember 2023.</p> <p>b. untuk Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, dilaksanakan di Kota Yogyakarta pada tanggal 8 Desember 2023.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Penanganan perkara perdata dan tata usaha negara sebanyak 16 perkara (12 Perkara Perdata dan 4 Tata Usaha Negara)</li> <li>7. Kegiatan In House Training Advokasi Hukum Penanganan Perkara Perdata dan Perkara Tata Usaha Negara diikuti oleh 60 Peserta terdiri dari UPT lingkup Ditjen KSDAE dan UPTD Tingkat Provinsi</li> <li>8. Perizinan Akses Terhadap Sumber Daya Genetik dan Penelitian Sebanyak 57, Persetujuan Perolehan TSL untuk Lembaga Konservasi sebanyak 30, Induk Penangkaran sebanyak 4, Sumber Daya Genetik dan Penelitian sebanyak.</li> <li>9. Evaluasi kerja sama ormas asing sebanyak 3 (tiga) kerja sama, yaitu Orangutan Foundation International (OFI), Orangutan Foundation (OF-UK), dan Frankfurt Zoological Society (FZS), serta monitoring pelaksanaan MSP ormas asing sebanyak 3 (tiga) kerja sama, yaitu Fauna &amp; Flora International (FFI), Wildlife Conservation Society (WCS), dan The Aspinnall Foundation.</li> <li>10. Tersedianya dokumen kerja sama yang telah ditandatangani sebanyak 2 (dua) dokumen, yaitu MSP antara KLHK dengan Orangutan Foundation International (OFI), dan PKS antara Dirjen KSDAE dengan Copenhagen Zoo.</li> <li>11. Tersusunnya draf MSP antara KLHK dengan Fauna &amp; Flora International (FFI).</li> <li>12. Fasilitasi penyusunan dokumen (Proposal, Dokumen Proyek, Perjanjian, AWP) dan monev kerja sama dalam negeri</li> <li>13. Fasilitasi Asistensi Penggunaan Tenaga Ahli Asing dan Permohonan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebanyak 1 (satu) kali.</li> </ol>
Pengelolaan Kepegawaian, Jabfung dan Ortala	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formasi pegawai Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2023 sebanyak 1.172 (seribu seratus tujuh puluh dua) formasi Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk mengisi hanya untuk formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).</li> <li>2. Pemutakhiran data SIMPEG Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2023 sebanyak 10.143 transaksi berdasarkan NIP dan data SIMPEG sebagai bahan sinkronisasi ke dalam Aplikasi SIASN BKN.</li> <li>3. Penyelesaian Pensiun PNS BUP sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) pegawai, dan pensiun meninggal sebanyak 22 (dua puluh dua) pegawai.</li> <li>4. Penyelesaian kenaikan pangkat/golongan PNS tahun 2023 sebanyak 1455 pegawai pada periode April 898 PNS dan periode Oktober 557 PNS.</li> <li>5. Pengambilan Sumpah/Janji PNS sebanyak 271 PNS lingkup Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2023.</li> <li>6. Jumlah pegawai Ditjen KSDAE yang mengikuti tugas belajar Program Doktorat (S3) sebanyak 8 orang, Magister 14 orang. Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan secara mandiri program Doktorat 2 orang, Magister 23 orang, dan Sarjana 73 orang.</li> <li>7. Pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya sebanyak 289 penghargaan untuk pegawai Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE</li> <li>8. Laporan atas adanya pelanggaran disiplin pegawai lingkup Ditjen KSDAE pada tahun 2023 sebanyak 41 kasus, dengan rincian yaitu kasus yang telah tuntas dengan terbitnya Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin</li> </ol>

Komponen	Capaian
	<p>sebanyak 14 kasus, laporan disiplin pegawai yang telah ditindaklanjuti oleh Ditjen KSDAE dan dalam Proses Biro Kepegawaian sebanyak 21 kasus, dan kasus yang masih dalam proses pendalaman UPT sebanyak 7 kasus.</p> <p>9. Pengajuan Izin Perceraian PNS pada Ditjen KSDAE selama tahun 2023 terdapat 14 pengajuan, dimana yang sudah terbit Keputusan Pemberian Izin Perceraian sebanyak 10 (sepuluh) dokumen, sementara yang masih dalam proses melengkapi berkas/dokumen oleh masing-masing yang bersangkutan/UPT sebanyak 4 (empat) pengajuan.</p> <p>10. Penilaian DUPAK jabatan fungsional Polhut dan PEH telah dinilai sebanyak 542 PAK atau sebanyak 1.164 Buku dengan rincian jumlah PAK Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan sebanyak 257 PAK atau sebanyak 643 Buku dan Jumlah PAK Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebanyak 285 PAK atau sebanyak 521 Buku.</p> <p>11. Pengembangan karir pegawai melalui mekanisme tes 4 kriteria sebanyak 14 orang secara reguler dan 2 orang secara khusus, jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Pembentukan PEH sebanyak 21 orang, jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Pembentukan Polhut sebanyak 316 orang, jumlah pegawai yang mengikuti diklat dasar CPNS sebanyak 0 orang pegawai, jumlah pegawai yang mengikuti ujian dinas/PI/PG sebanyak 6 orang, jumlah pegawai yang diusulkan pencantuman gelar sebanyak 86 pegawai dan jumlah pegawai yang mengikuti Ujian Dinas dan 75 orang.</p> <p>12. Pemberkasan kenaikan jabatan fungsional selama tahun 2023 sebanyak 320 pejabat fungsional.</p>

Tabel 18. Layanan Sarana Internal

Komponen	Capaian
Pengadaan Kendaraan Bermotor	Pengadaan kendaraan bermotor sebanyak 4 unit, yaitu 1 unit Sedan, 1 unit Mobil Listrik, dan 2 unit sepeda motor.
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi sebanyak 55 unit, yaitu 17 unit P.C. Unit, 3 unit Notebook, dan 35 unit Laptop.
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran sebanyak 169 unit, yaitu 16 unit Printer, 15 unit Scanner, 3 unit A.C. Split, 3 unit A.C. Sentral, 1 unit Mesin Hitung Uang, 2 unit Camera Conference, 2 unit Sound System, 2 unit Wireless Microphone, 5 unit LCD Projector/Infocus, 3 unit Televisi, 1 unit Camcorder, 4 unit Standing Bracket, 2 unit Kamera Digital, 1 unit CCTV, 1 unit External/Portable Hardisk, 91 unit Kursi Zeis, 1 unit Meja Resepsionis, 1 unit Sofa, 3 unit Lemari Kayu, 3 unit Meja Kerja Kayu, dan 9 unit Rak Kayu.

Tabel 19. Layanan Prasarana Internal

Komponen	Capaian
Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan	Renovasi gedung dan bangunan sebanyak 1 unit, yaitu paket renovasi Lahan Parkir dan Ruang Kerja Gedung Ditjen KSDAE Bogor.





## BAB IV PENUTUP

Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE sebagai unit kerja eselon II memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Melalui kegiatan yang bersifat generik, berupa dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal KSDAE, dapat diketahui tingkat capaian kinerja fisik tahun 2023 sebesar 100,16 % dan kinerja keuangan sebesar 98,70 %. Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2023 dapat dikatakan berjalan efisien, hal ini dilihat dari nilai rasio kinerja fisik dengan kinerja keuangan sebesar 0,99.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam laporan ini, dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Ditjen KSDAE telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Sekretariat Ditjen KSDAE Tahun 2023 secara umum dapat dikatakan baik, dengan beberapa catatan yang perlu diperbaiki kedepannya. Beberapa catatan dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja Sekretariat Ditjen KSDAE kedepannya yaitu:

1. Meningkatkan kualitas data capaian kinerja
2. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya
3. Meningkatkan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Sekretariat Ditjen KSDAE untuk meningkatkan kinerja
4. Melakukan benchmarking dengan unit kerja lain yang memiliki kinerja yang baik

Dengan melakukan upaya-upaya perbaikan kinerja tersebut, diharapkan Sekretariat Ditjen KSDAE dapat meningkatkan kinerja kedepannya. Akhirnya, atas dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran Sekretariat Ditjen KSDAE, capaian kinerja Sekretariat Ditjen KSDAE Tahun 2023 dapat tercapai. Semoga capaian kinerja ini dapat terus ditingkatkan di masa yang akan datang.

# LAMPIRAN

## 1. Perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen KSDAE

### PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suharyono, S.H., M.Si., M.Hum  
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M  
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023



Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M  
NIP. 19640930 198903 1 001



Suharyono, S.H., M.Si., M.Hum  
NIP. 19670401 199403 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suharyono, S.H., M.Si., M.Hum  
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2023

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Suharyono, S.H., M.Si., M.Hum  
NIP. 19670401 199403 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SATUAN KERJA

Unit Organisasi Eselon I : Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem  
Unit Satuan Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem  
Tahun Anggaran : 2023

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET IKK
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE Level Maturitas (SPIP) Ditjen KSDAE Laporan Keuangan Ditjen KSDAE	79,5 Poin Level 3 1 Dokumen

Program/Kegiatan :

**Program Dukungan Manajemen**  
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen  
Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

Anggaran :

Rp.92.374.307.000,-

Jakarta, Januari 2023

Plt. Direktur Jenderal,  
  
Bambang Hendroyono, M.M  
NIP. 19640930 198903 1 001

Sekretaris Direktorat Jenderal,  
  
Suharyono, S.H., M.Si., M.Hum  
NIP. 19670401 199403 1 003

## 2. Rencana Aksi Perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen KSDAE

RENCANA AKSI  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SATUAN KERJA

Unit Organisasi Eselon I : Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem  
Unit Satuan Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE  
Tahun Anggaran : 2023

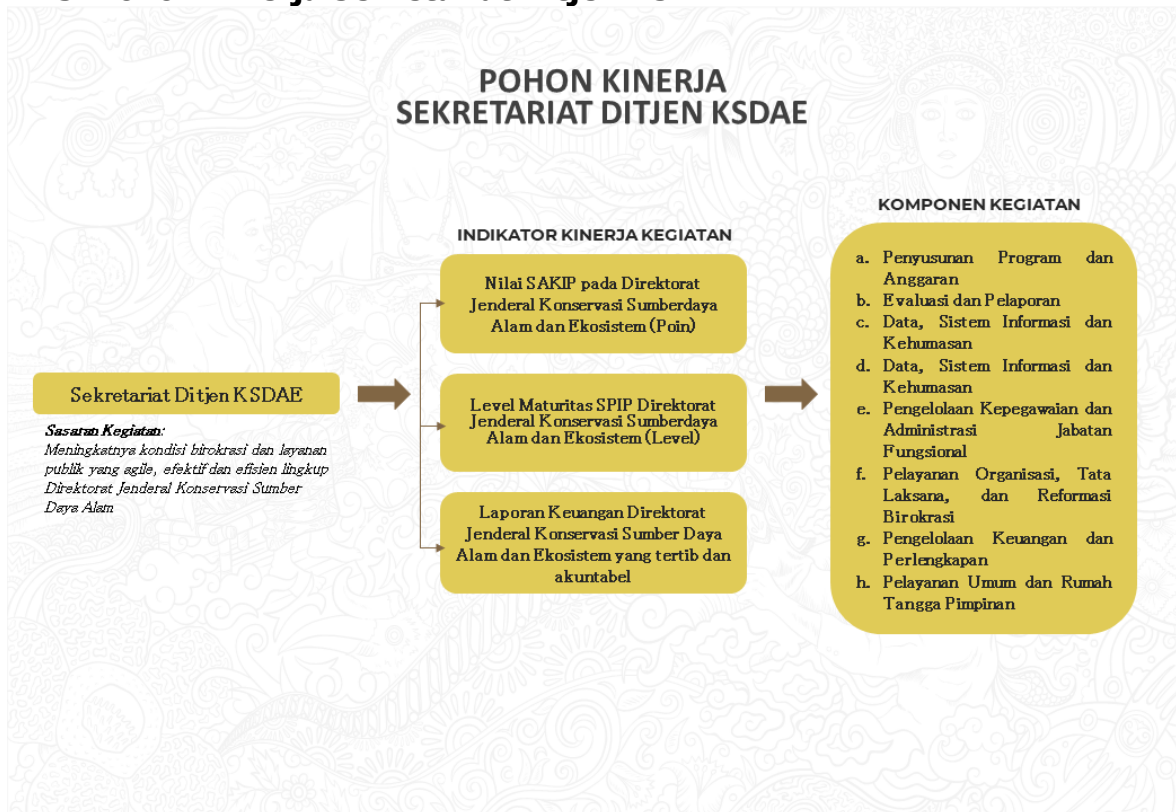
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET IKK	B03		B06		B09		B12	
				Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
1.	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE	79,5 Poin	0	Poin	79,5	Poin	79,5	Poin	79,5	Poin
				Penjelasan Capaian: Penyusunan Program Anggaran, Evaluasi, Data, dan Informasi; Hukum dan Kerjasama Teknik; Pengelolaan Kepegawaian, Jabatan Fungsional, dan Orta, Pengelolaan Keuangan dan Umum		Penjelasan Capaian: 1. Penyusunan Program Anggaran, Evaluasi, Data, dan Informasi; Hukum dan Kerjasama Teknik; Pengelolaan Kepegawaian, Jabatan Fungsional, dan Orta, Pengelolaan Keuangan dan Umum  2. Persiapan data dukung penilaian SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE  3. Penilaian SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE oleh Tim Inspektorat Jenderal		Penjelasan Capaian: Penyusunan Program Anggaran, Evaluasi, Data, dan Informasi; Hukum dan Kerjasama Teknik; Pengelolaan Kepegawaian, Jabatan Fungsional, dan Orta, Pengelolaan Keuangan dan Umum		Penjelasan Capaian: 1. Penyusunan Program Anggaran, Evaluasi, Data, dan Informasi; Hukum dan Kerjasama Teknik; Pengelolaan Kepegawaian, Jabatan Fungsional, dan Orta, Pengelolaan Keuangan dan Umum	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET IKK	B03		B06		B09		B12	
				Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal KSDAE	Level 3	0	Level	0	Level	0	Level	3	Level
				Penjelasan Capaian: 1. Penyusunan Desain SPIP yang sudah direvisi oleh Itjen 2. Penyusunan Laporan pemantauan dan evaluasi Triwulan I pada aplikasi SPIP online		Penjelasan Capaian: 1. Pemantauan kebijakan pengendalian pada risiko signifikan pada Triwulan II 2. Penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi Triwulan II		Penjelasan Capaian: 1. Pemantauan kebijakan pengendalian pada risiko signifikan pada triwulan III 2. Penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi Triwulan III 3. Persiapan data dukung penilaian maturitas SPIP Ditjen KSDAE		Penjelasan Capaian: 1. Pemantauan kebijakan pengendalian pada risiko signifikan pada Triwulan IV 2. Penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi Triwulan IV serta laporan penyelenggaraan SPIP tahun 2023. 3. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2023 Ditjen KSDAE meliputi Penilaian Mandiri oleh Eselon I, Penilaian Perjamiran Kualitas (PK) oleh Inspektorat KLHK, dan Evaluasi oleh BPKP atau hasil PK oleh Inspektorat.	
		Laporan Keuangan Ditjen KSDAE yang terbit dan akuntabel	1 Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen
				Tahapan: 1. Konsolidasi dan Telaah Data Transaksi Keuangan Lingkup		Tahapan: 1. Konsolidasi dan Telaah Data Transaksi Keuangan Lingkup Ditjen		Tahapan: 1. Konsolidasi dan Telaah Data Transaksi Keuangan Lingkup		Tahapan: 1. Konsolidasi dan Telaah Data Transaksi Keuangan	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET IKK	B03		B06		B09		B12	
				Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
				Ditjen KSDAE Tahun 2022		KSDAE Semester I Tahun 2023		Ditjen KSDAE Triwulan III Tahun 2023		Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2023	
			2. Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Setdijen KSDAE Tahun 2022		2. Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Setdijen KSDAE Semester I 2023		2. Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Setdijen KSDAE Triwulan III 2023		2. Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Setdijen KSDAE Tahun 2023		2. Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Setdijen KSDAE
					3. Pembinaan Keuangan kepada UPT Lingkup Ditjen KSDAE		3. Pembinaan Keuangan kepada UPT Lingkup Ditjen KSDAE		3. Pembinaan Keuangan kepada UPT Lingkup Ditjen KSDAE		3. Pembinaan Keuangan kepada UPT Lingkup Ditjen KSDAE

Jakarta, Januari 2023  
 Sekretaris Direktorat Jenderal,  
  
 Suharyono, S.H., M.Si., M.Hum  
 NIP. 19670401 199403 1 003

### 3. Pohon Kinerja Sekretariat Ditjen KSDAE







**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KSDAE**

**Gedung Manggala Wanabakti Blok 1 Lantai 8  
Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, 10270  
Telp. (021) 573-3437**